

**PERSETUJUAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA**

**TENTANG KERJASAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China, selanjutnya disebut "Para Pihak";

**Mengacu** pada Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Kemitraan Strategis, ditandatangani pada tanggal 25 April 2005;

**Berkeinginan** meningkatkan atau mempererat saling percaya dan kerjasama dalam bidang pertahanan dan militer untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan dan internasional;

**Menyadari** hubungan baik yang terjalin antara kedua negara dan rakyat kedua negara;

**Mengakui** bahwa diperkuatnya kerjasama pertahanan akan bermanfaat bagi pertahanan nasional kedua negara, khususnya Angkatan Bersenjata kedua negara;

**Berdasarkan** hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

**PASAL I**  
**PRINSIP UMUM**

Para pihak akan memperkuat dan mengembangkan hubungan baik dan kerjasama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati atas kemerdekaan, keadautan dan integritas teritorial, tidak saling melakukan agresi, tidak saling campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan, saling menguntungkan dan damai berdampingan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal.

## **PASAL II** **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama dari Persetujuan meliputi:

1. Pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan.
2. Pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama.
3. Pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih, dan bentuk kerjasama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama.
4. Peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri kedua negara untuk keuntungan dan kepentingan bersama Para Pihak, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknik, pelatihan, penyediaan peralatan pertahanan dan produksi bersama.
5. Kerja sama di bidang latihan pertahanan, termasuk pelatihan militer bersama antara angkatan bersenjata kedua negara.
6. Kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

## **PASAL III** **PERATURAN PELAKSANAAN**

Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua negara dapat membentuk peraturan-peraturan pelaksanaan tertentu terkait dengan aspek-aspek khusus kerjasama dalam kerangka Persetujuan ini.

## **PASAL IV** **KOMITE BERSAMA**

1. Guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk suatu Komite Bersama.
2. Komite Bersama akan terdiri dari perwakilan dari masing-masing Pihak. Jumlah perwakilan dari masing-masing Pihak harus disepakati secara bersama oleh Para Pihak.

3. Komite Bersama akan diketuai bersama oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Ketua Kantor Urusan Luar Negeri Kementerian Pertahanan Nasional Pemerintah Republik Rakyat China.

4. Tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang potensial;
- b. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
- c. Merekomendasikan dan memprakarsai kegiatan-kegiatan kerja sama;
- d. Mengorganisir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui, apabila diperlukan;
- e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol kegiatan-kegiatan yang disetujui;
- f. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan-kegiatan kerja sama;
- g. Menyerahkan laporan bersama pada setiap akhir pertemuan kepada Menteri Pertahanan masing-masing.

5. Komite Bersama dapat membentuk sub-komite untuk secara efektif menangani proyek-proyek khusus yang merupakan kepentingan bersama.

6. Komite Bersama pada prinsipnya harus menyelenggarakan Dialog Pertahanan Indonesia-China sekali dalam setahun, secara bergantian di masing-masing negara.

7. Tanggal, tempat, dan agenda Dialog dimaksud harus disepakati oleh Ketua Komite Bersama.

## **PASAL V** **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Sesuai dengan hukum masing-masing Negara, Para Pihak harus memberikan perlindungan dan distribusi yang efisien terhadap hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah, yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan ini. Masalah perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak yang sah pihak ketiga, dengan mempertimbangkan pembagian kepemilikan yang adil berdasarkan kontribusi dari masing-masing partisipan, akan diatur dalam persetujuan yang disepakati oleh organisasi dari Para Pihak di bidang kerja sama yang lebih khusus.

## **PASAL VI** **KERAHASIAAN**

1. Para Pihak berkewajiban melindungi informasi rahasia yang dapat diperoleh dari kerangka Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan Negara masing-masing.
2. Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi yang disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Bersama. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menunjukkan tingkat kerahasiaan dan Negara Asal sebagai berikut:

<b><u>INDONESIAN</u></b>	<b><u>CHINESE</u></b>	<b><u>ENGLISH</u></b>
SANGAT RAHASIA	绝密	TOP SECRET
RAHASIA	机密	SECRET
TERBATAS/KONFIDENSIAL	秘密	CONFIDENTIAL
BIASA	普通	UNCLASSIFIED

3. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka Perjanjian ini tidak boleh dipindah tanggalkan, diumumkan atau disebarluaskan, secara langsung maupun tidak langsung, sementara ataupun bersifat tetap, kepada pihak ketiga, baik perorangan ataupun badan, tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Pihak asal.

## **PASAL VII** **PEMBIAYAAN**

Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak; alokasi anggaran masing-masing Pihak akan ditentukan dalam peraturan pelaksanaan.

## **PASAL VIII** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap permasalahan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama guna penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 1, Para Ketua Komisi Bersama akan membawa permasalahan tersebut kepada Menteri Pertahanan masing-masing Pihak untuk penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 2, permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

## **PASAL IX PERUBAHAN**

1. Persetujuan ini dapat diubah setiap saat, dalam bentuk protokol, melalui kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak.
2. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak dan menjadi bagian dari Persetujuan ini.
3. Setiap perubahan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul atau berdasarkan Persetujuan ini atau persetujuan lainnya yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sebelum atau sampai tanggal dimana perubahan tersebut mulai berlaku.

## **PASAL X PEMBERLAKUAN, KEABSAHAN DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada saat penerimaan pemberitahuan terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada waktu berakhirnya dapat secara otomatis diperbarui untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari sebelum Pihak tersebut bermaksud mengakhiri Persetujuan ini.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam kerangka Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Beijing, pada tanggal tujuh bulan November tahun 2007 dalam dua naskah asli, dalam bahasa Indonesia, China dan Inggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Signed

---

JUWONO SUDARSONO

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK RAKYAT CHINA**

Signed

---

JENDERAL CAO GANGCHUAN

# 印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国 政府关于防务领域合作的协议

印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府（以下简称“双方”），

根据 2005 年 4 月 25 日签署的《印度尼西亚共和国和中华人民共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言》；

为增进和加强防务和军事领域的互信与合作，以维护地区及世界的和平与稳定；

考虑到两国及两国人民之间现有的友好关系；

认识到加强防务合作将有利于双方的国防，尤其是双方的武装部队；

在两国现行法律和规定的基础上，

达成如下协议：

## 第一条 总 则

双方在《联合国宪章》以及其它公认的国际法准则中阐明的相互尊重独立、主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处各项原则的基础上，加强和发展双方在防务领域的友好合作。

## 第二条 合作范围

本协议的合作范围包括：

- (一) 交换防务机构和防务事务方面的信息，包括组织形式、理论和政策；
- (二) 在互利和一致同意的基础上互派军官进行学习和职业培训，进行团组互访和联合研究；
- (三) 在互利和一致同意的基础上交流科技资料、专家、技术人员和教官，以及开展其它形式的技术合作；
- (四) 推动两国国防技术和工业等防务机构之间的互利合作，包括科技交流、技术支持、培训、提供防务装备和联合生产；
- (五) 开展防务演习合作，包括两国军队的联合训练演习；
- (六) 其他双方共同感兴趣的领域的合作。

## 第三条 实施办法

两国国防部应根据本协议框架内的具体合作项目制定有针对性的实施办法。

## 第四条 联合委员会

一、为监督、管理和执行本协议，双方同意建立一个联

合委员会。

二、联委会应由双方代表组成。每方的代表人数应由双方商定。

三、联委会主席应由印度尼西亚共和国国防部国防战略总司长和中华人民共和国国防部外事办公室主任共同担任。

四、联委会的主要任务如下：

(一) 探索、确定可能的合作领域；

(二) 确认共同关心的项目；

(三) 推荐、启动合作活动；

(四) 如果需要，组织并实施已获批准的合作活动

(五) 协调、监督并控制已获批准的合作活动

(六) 解决在合作活动执行过程中出现的问题

(七) 在联委会每次会议结束后向各自的国防部长递交一份联合报告。

五、联委会可建立下属委员会以有效管理对双方共同感兴趣的具体项目。

六、联委会原则上每年举行一次中印尼防务安全磋商，轮流在两国举行。

七、磋商的时间、地点和议程应得到双方主席同意。

## 第五条 知识产权

根据各自国家的法律，双方应对本协议下转让或产生的知识产权，包括其所有权和合法使用，给予足够的保护。负责双方具体合作行为的相关组织应根据每一方对某一项知识产权的贡献多少达成相关协议，从而规范知识产权保护，包括对第三方合法权益的保护。

## 第六条 保 密

一、双方应根据两国的国家法律和规定保护本协议框架内双方可接触到的涉密信息。

二、涉密信息和设备只允许在双方联委会主席同意的正式渠道提供。对这些信息和设备的密级和国别的标识应采取如下方式：

中文	印尼文	英文
绝密	SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
机密	RAHASIA	SECRET
秘密	TERBATAS/KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL
普通	BIASA	UNCLASSIFIED

三、本协议框架内接获的任何信息或设备未得到原有方事先同意均不得以直接或间接的方式，临时或长期转让、透漏或发布给任何第三方，无论是个人或法人。

## **第七条 资金保障**

本协议应根据各方的预算拨款执行。各方的预算拨款应根据执行计划制定。

## **第八条 争端的解决**

一、对本协议的解释或执行产生的任何问题应首先提交联合委员会，以获妥善解决。

二、该问题在第一款规定的情况下若仍未解决，双方主席应将其上报给各自的国防部长，以获妥善解决。

三、该问题在第二款规定的情况下若仍未解决，则应由双方通过外交渠道解决。

## **第九条 修 改**

本协议可在双方书面同意的前提下以议定书的形式进行修改。

双方一致同意后修改即可生效，并成为本协议的一部分。

任何修改不影响在该修改生效前根据本协议签署的任何协议所规定的权利和义务。

## **第十条 生效、有效期和终止**

一、双方应相互书面通知已完成协议生效所必需的国内

法律程序。协议自后一份通知发出之日起生效。

二、本协议有效期为 5 年，如果双方均没有在有效期截止前至少 90 天书面通知另一方终止本协议，则本协议有效期自动延长 5 年。

三、协议的终止不影响在本协议框架内任何行为的有效期。

本协议于 2007 年 11 月 7 日在北京签订，一式两份，每份均用印尼文、中文和英文写成，三种文本同等作准。若对文本的解释出现歧义，以英文文本为准。

印度尼西亚共和国政府代表 中华人民共和国政府代表

Signed

Signed

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION  
ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of The People's Republic of China, hereinafter referred to as the "Parties";

Considering the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership, signed on April, 25th, 2005;

Desiring to enhance or strengthen mutual trust and cooperation in defence and military field so as to promote regional and international peace and stability;

Acknowledging the existing friendly relations between the two countries and their peoples;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to both national defences, particularly to both Armed Forces;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries, Have agreed as follows:

## **ARTICLE I**

### **GENERAL PRINCIPLE**

The parties shall strengthen and develop friendly relationship and cooperation in the defence field on the basis of the principles of mutual respect for each other's independence, sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality, mutual benefit and peaceful co-existence as enshrined in the *United Nations Charter* and other universally recognized norms of international law.

## **ARTICLE II**

### **SCOPE OF COOPERATION**

The scope of cooperation of this Agreement shall include:

1. Exchange of information on defence establishment and matters, including the organization, doctrine and policy.
2. Exchange of officers for education and professional training, mutual visits and joint research based on the principle of reciprocity and mutual consent.
3. Exchange of scientific and technological data, experts, technicians, trainers, as well as other forms of technical cooperation based on the

principle of reciprocity and mutual consent.

4. Promotion of the cooperation between the defence technology and industry institutions of the countries for the mutual benefit and interest of the Parties, including the exchange of technology, technical assistance, training, provision of defence equipment and joint production.
5. Cooperation in the field of defence exercises, including joint military training exercises between the armed forces of the two countries.
6. Cooperation in other field of mutual interest.

### **ARTICLE III IMPLEMENTING ARRANGEMENTS**

The Ministry or Department of Defence of both countries may conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of cooperation within the framework of this Agreement.

### **ARTICLE IV JOINT COMMITTEE**

1. In order to monitor, manage and implement the Agreement, the Parties agree to establish a Joint Committee.
2. The Joint Committee shall compose of representatives from each

Party. The number of representatives from each Party shall be mutually agreed by the Parties.

3. The Joint Committee shall be Co-Chaired by the Director General for Defence Strategy of the Department of Defence of the Republic of Indonesia and the Chief of the Foreign Affair Office of the Ministry of National Defence of the People's Republic of China.

4. The tasks of the Joint Committee are as follows:

a. To explore and identify potential areas of cooperation;

b. To identify items of common interest;

c. To recommend and initiate the cooperative activities;

d. To organize and implement the approved activities, if required;

e. To coordinate, monitor and control the approved activities;

f. To resolve problems arising out of the implementation of the cooperative activities;

- g. To submit at the conclusion of each meeting a joint report to their respective Defence Ministers.
5. The Joint Committee may establish sub-committees to effectively address specific projects of mutual interest.
6. The Joint Committee shall also in principle hold a Sino-Indonesia Defence and Security Dialogue once a year, alternately in each country.
7. The date, site and agenda of the Dialogue shall be agreed upon by the Co-Chairpersons.

## **ARTICLE V**

### **INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

In accordance with the legislation of their states, the Parties shall provide efficient protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in accordance with this Agreement. The issues of protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate rights, taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants, shall be regulated by the agreements concluded by organizations of the Parties on specific areas of cooperation.

## **ARTICLE VI**

### **CONFIDENTIALITY**

1. The Parties shall protect the classified information to which they may have access within the framework of this Agreement in accordance with both national laws and regulations.
  
2. The classified information and equipment shall only be provided through official channels agreed upon by Co-Chairs of the Joint Committee. These information and equipment are to be labelled with the indication of their classification level and Country of Origin as follows:

<b><u>CHINESE</u></b>	<b><u>INDONESIAAN</u></b>	<b><u>ENGLISH</u></b>
绝密	SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
机密	RAHASIA	SECRET
秘密	TERBATAS/KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL
普通	BIASA	UNCLASSIFIED

3. All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party.

## **ARTICLE VII**

### **FUNDING**

This Agreement shall be implemented in accordance with the budgetary allocation of each Party; the budgetary allocation of each Party shall be defined in the implementing arrangement.

## **ARTICLE VIII**

### **SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. Any matter arising from this Agreement with respect to its interpretation or implementation shall, in the first instance, be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.
2. In the event that the matter is not settled under paragraph 1, both Co-Chairs of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence for amicable settlement.
3. In the event that the matter is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channel.

## **ARTICLE IX**

### **AMENDMENTS**

1. This Agreement can be amended at any time by mutual written agreement in the form of protocol between both Parties.

2. Such amendment shall enter into force on such date as may be mutually agreed upon by the Parties and shall form part of this Agreement.
3. Any amendment shall not affect the right and obligations arising or based on this Agreement or any agreement entered into under this Agreement before or up to the date such amendment enters into force.

## **ARTICLE X**

### **ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the date of last notification on which the Parties have informed each other, through diplomatic channels, of compliance with the legal requirements necessary for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and upon the expiry thereof may automatically be renewed for another five (5) years unless it is renounced by either Party by giving written notice to the other at least ninety (90) days prior to its intention to terminate this Agreement.
3. The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any activities concluded within the framework of this Agreement.

Done in duplicate in Beijing on November 7<sup>th</sup>, in 2007 in two originals, each in Indonesian, Chinese and English languages, all texts are being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT  
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC  
OF CHINA**

Signed

Signed

---

**JUWONO SUDARSONO**

---

**GEN. CAO GANG CHUAN**